

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung penduduk wilayah administratif daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih kepala daerah di wilayahnya seperti Gubernur di daerah Provinsi dan Bupati/Walikota di daerah Kabupaten/Kota. Pemilihan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Daerah, baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ada di setiap daerah dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung pertama kali dilaksanakan tahun 2005 pada bulan juni, yang didahului oleh pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun sejak berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, undang-undang tersebut kemudian terus mengalami pergantian hingga pada saat ini menjadi UU No. 6 Tahun 2020 (BPK RI, 2020). Pemilihan kepala daerah yang biasa disebut Pilkada sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan mulai dari pembentukan panitia pilkada hingga pelantikan pasangan kepala daerah yang telah terpilih (Hutapea, 2015).

Pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh masyarakat dengan memilih secara langsung calon pasangan kepala daerah yang telah terdaftar di

KPU, masyarakat dapat memilih pasangan kepala daerahnya sesuai dengan pilihan masing-masing secara bebas, jujur dan adil. Mayoritas suara terbanyak yang diraih oleh pasangan kepala daerah menjadi acuan pemenang dalam pilkada. Dengan adanya pilkada secara langsung diharapkan masyarakat memiliki pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka yaitu pemimpin yang bisa membawa wilayah Indonesia menjadi yang makmur, aman, dan maju. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pilkada peran masyarakat sangatlah penting, karena suara dari masyarakatlah yang akan menentukan siapa calon pasangan kepala daerah yang terpilih dan akan dilantik.

Namun seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan pilkada biasanya menyisakan dampak tersendiri bagi beberapa masyarakat hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pilkada selalu timbul konflik yang terjadi dalam masyarakat dan tidak jarang konflik yang terjadi berlangsung lama hingga menimbulkan rasa tidak nyaman di lingkungan masyarakat sekitar. Konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada berbanding terbalik dengan tujuan pilkada yaitu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Konflik yang terjadi seringkali berhubungan dengan proses interaksi yang dilakukan oleh antar individu, antar kelompok ataupun individu dengan kelompok (Amiruddin, 2020).

Biasanya konflik yang terjadi diantara masyarakat terkait pilkada sangat beragam, hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku, agama, dan tujuan politik yang berbeda (Yahya, 2021). Dari konflik inilah yang akan menimbulkan dampak pada masyarakat, dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pilkada bisa terjadi sebelum bahkan setelah dilakukannya

pemilihan, dampak yang terjadipun berbeda-beda pada setiap masyarakat baik itu dampak ekonomi maupun dampak sosial (Yusnedi, 2018). Hal ini biasanya timbul karena adanya perbedaan pilihan calon kepala daerah yang didukung antar masyarakat.

Analisis dampak sosial merupakan hal yang penting untuk dikaji, studi tentang analisis sosial saat ini juga sudah semakin berkembang karena adanya kesadaran bahwa masyarakat merupakan komponen penting dalam pembangunan (Suryono, 2018). Namun, seperti yang kita tau fakta dilapangan membuktikan bahwa banyak hal yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan, seperti halnya dengan pilkada.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi pada saat pilkada dimana 80% - 85% dari jumlah daftar pemilih tetap ikut serta dalam pilkada (Mansyur, 2018). Untuk pilkada terakhir yaitu tahun 2018 Partisipasi masyarakat mencapai 84% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 267.225 dari 723 TPS yang tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Pinrang. Adapun jumlah partai pendukung yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah 2018 di Kabupaten Pinrang yaitu sebanyak 12 partai yang kemudian terbagi menjadi 3 kubu dengan jumlah kandidat calon kepala daerah yang terdiri dari:

Tabel 1. 1 Daftar Kandidat Calon Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018

Nomor Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah	Partai Pendukung
1.	Ir. H. Abdul Latif, M.Si, MM, IPM.	- GOLKAR - PBB

	H. Usman Marham	- PPP - HANURA - NASDEM - PERINDO
2.	H.A.Irwan Hamid,S.Sos Drs.H. ALIMIN,M.Si	- DEMOKRAT - PDIP - PKB
3.	H. Jamaluddin Jafar H. A. Sofyan Nawir, S.SOS.,M.Si	- PKS - PAN - GERINDRA
4.	H. Hamka Mahmud, SH.M.SI Ahsan, SH	PERSEORANGAN

Sumber : KPU Kabupaten Pinrang

Sebagian besar wilayah kabupaten pinrang dihuni oleh suku bugis dan suku pattinjo yang banyak berada di pinrang bagian utara, selain itu juga terdapat beberapa suku lain yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak seperti mandar, toraja dan jawa. Mayoritas masyarakat di kabupaten pinrang beragama Islam namun tidak sedikit yang bergama Kristen.

Penulis melihat bahwa setiap menjelang dan pasca pilkada di Kabupaten Pinrang, nampak jelas terjadi polarisasi antara warga dan kelompok masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya persaingan yang terjadi dalam masyarakat dalam memenangkan calon pilihannya, bahkan tidak sedikit warga yang rela mengeluarkan uang yang banyak menjelang pilkada demi mengumpulkan pendukung untuk calon pilihannya. Oleh karena itu penulis mengambil tema analisis dampak sosial pilkada untuk mengetahui dengan jelas apakah dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pinrang selama ini banyak menimbulkan

konflik dalam masyarakat serta apa saja dampak-dampak sosial yang timbul dalam masyarakat pasca dilaksanakannya pilkada.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja dampak yang terjadi pasca Pemilihan Kepala Daerah terhadap hubungan sosial masyarakat di Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pastinya memiliki tujuannya tersendiri yang akan dijadikan sebagai standar perkiraan dan menjadi target dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Dari beberapa masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menimbulkan konflik sosial pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi pasca Pemilihan Kepala Daerah terhadap hubungan sosial masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Berdasar pada tujuan dari penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, berikut merupakan manfaat-manfaat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap mampu memberi kontribusi dalam bidang pengetahuan serta perkembangan dalam Ilmu Sosial dan Politik terutama dalam Ilmu Pemerintahan khususnya yang berhubungan terkait pilkada. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan atau referensi dalam penelitian sejenis yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pinrang. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bahan evaluasi bagi pemerintah di Indonesia dalam meningkatkan sistem pemilihan kepala daerah.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat terkait dampak-dampak sosial apa saja yang bisa terjadi pada masyarakat dalam pelaksanaan pilkada.

1.4 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kumpulan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang berhubungan dengan topik atau tema penelitian ini. Penelitian terdahulu berisi referensi-referensi yang berkaitan dengan informasi penelitian (DKI, H. P., 2010). Hal ini dilakukan agar menjadi

pelengkap serta acuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang dibagi dalam beberapa kelompok.

1.4.1 Partisipasi Masyarakat pada Pilkada

Dalam penelitian (Nurhang, 2020) yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang” dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya-upaya komisi pemilihan umum Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih terhadap kepala daerah di Kabupaten Pinrang. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Pinrang melakukan teori agenda *setting* dimana terdapat dua level yang dilakukan level yang pertama adalah untuk memberikan solusi arti penting pilkada kepada masyarakat serta level yang kedua yaitu menentukan aspek dari isu yang ada dan dinilai penting kemudian di sebarakan melalui media cetak, audio, reklame dan lain-lain.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Puspasari, T. S., Hamid, A., & Fuad, 2012) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2011 di Kecamatan, Karawaci Kota Tangerang” membahas tentang apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Karawaci dalam memilih calon kepala daerah Provinsi Banten pada tahun 2011. Dari hasil

penelitian ini dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon kepala daerah yaitu faktor sosial imagery, identifikasi partai, kandidat, isu, peristiwa, dan faktor epistemik politik.

Dalam penelitian (Siahaan, 2016) yang berjudul “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Asahan Tahun 2015”. Dengan dilakukan menggunakan rumus korelasi product moment dari hasil analisis data wawancara, didapatkan bahwa hubungan sosial dan ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat adalah 52,3% sehingga dapat disimpulkan hubungan sosial dan ekonomi terhadap partisipasi politik di Kabupaten Asahan tergolong sedang.

Dalam penelitian (Muhaling, 2014) yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro” membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam hal politik serta faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pilkada terutama di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. Penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Siau Barat Selatan cukup tinggi hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti antusiasme masyarakat yang tinggi, pemikiran kritis masyarakat terkait pentingnya pilkada, peran media massa dalam memberikan informasi serta kinerja KPUD yang selalu mendorong minat masyarakat dalam memilih.

Dalam penelitian (Fadhila & Erowati, 2021) yang berjudul “Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19” yang diterbitkan POLITEA: Jurnal Politik Islam, membahas tentang pandemi covid-19 yang menjadi salah satu masalah terberat dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan partisipasi pemilih, oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun hasil dari pembahasan tersebut mengungkapkan bahwa KPU menerapkan strategi dengan memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial dan kegiatan virtual seperti mengadakan webinar. Sosialisasi tatap muka masih bisa dilaksanakan dengan mengurangi jumlah peserta dan juga melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Namun, implementasi strategi melalui media sosial atau online akan lebih dominan dilaksanakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Amanda et al., 2019) yang berjudul “Uji validitas dan reliabilitas tingkat partisipasi politik masyarakat kota Padang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang ukuran ketepatan dari kuosioner yang mengukur terkait tingkat partisipasi politik warga kota padang dengan menggunakan teknik uji validitas dan reliabilitas. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa kuosioner yang dilakukan sudah reliabel yang berarti kuosiner yang digunakan dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat sudah valid.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Krisna Ruphi, 2017) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap partisipasi

Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kelurahan Tamanarum Kabupaten Ponorogo Tahun 2015” membahas tentang pengaruh tingkatan pendidikan formal terhadap partisipasi masyarakat Kelurahan Tamanarum dalam pilkada Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015. Adapun tingkat pendidikan dalam masyarakat didominasi oleh pendidikan tingkat atas disusul dengan pendidikan tingkat tinggi kemudian sisanya merupakan pendidikan tingkat rendah. Selain itu, partisipasi masyarakat Tamanarum dalam pilkada tergolong tinggi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada satupun pemilih dengan latar pendidikan tinggi dalam hal ini mereka yang lulus perguruan tinggi memiliki partisipasi rendah sedangkan mereka dengan latar pendidikan rendah masih kurang dalam hal partisipasi politiknya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Jayani, 2017) yang berjudul “Perilaku Memilih Masyarakat Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2015” mengkaji tentang bagaimana perilaku masyarakat Kota Surabaya dalam menentukan pilihannya pada pilkada. Dengan menggunakan analisis kuantitatif, penelitian ini mendapatkan bahwa dalam memilih, masyarakat tidak terlalu mementingkan status sosial dan ekonomi kandidat namun lebih berdasar kepada program-program serta evaluasi kandidat dalam menentukan pilihannya, selain itu masyarakat juga menilai dari pendekatan rasional dari beberapa isu politik yang ada.

1.4.2 Konflik dan Dampak Pilkada Terhadap Hubungan Sosial

Dalam penelitian (Herdin Arie Saputra, 2017) yang berjudul “Faktor Penyebab Aksi Penolakan pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Pada Tahun 2015” membahas terkait konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu penyebab konflik tersebut yaitu adanya salah satu kubu calon yang tidak terima dengan hasil pemungutan suara. Selain itu masyarakat memiliki keinginan yang cukup tinggi kepada putra daerah untuk menjadi kepala daerah disana. Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi terjadinya konflik pada aksi penolakan tersebut yaitu sentimen kedaerahan, perilaku masyarakat, moral serta budaya dan tingkat intelektual masyarakat.

Dalam penelitian (Riadi, 2016) yang berjudul “Dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Pakacangan RT 5 dan 6 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara” dengan menggunakan metode pendekatan secara deskriptif kualitatif, dari hasil dari penelitian ini terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari pemilihan kepala daerah yaitu pertama dampak sosial, terlihat bahwa pasca berlangsungnya pilkada terjadi beberapa kerusuhan hingga perkelahian dalam masyarakat. Kedua yaitu terjadi dampak dalam sektor keagamaan yaitu beberapa kegiatan keagamaan yang menjadi macet dan tidak berjalan lagi seperti seperti acara kegiatan yasinan yang rutin dilakukan sebelumnya, acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj.

Dalam penelitian yang dilakukan (Ida Farida, Nanang Permana, Sopwan Ismail, 2020) yang berjudul “Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”. Penelitian ini membahas terkait bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pilkada langsung memberikan beberapa dampak terhadap daerah-daerah di Indonesia. Seperti pelaksanaan pilkada langsung yang cukup mahal bagi para kandidat diduga menjadi penyebab beberapa kepala daerah berakhir di KPK, selain itu kurangnya pendidikan politik dalam masyarakat memberikan dampak negatif terhadap pilkada.

Pada penelitian yang dilakukan (Asrul Lapandewa, Rina Pusparani, 2020) yang berjudul “Dampak Pilkada Tahun 2015-2020 Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Waesili Kecamatan Waesama”, membahas tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan pemilihan kepala daerah dalam kurung tahun 2015 hingga tahun 2020 dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Waesili. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa terjadi beberapa dampak yang diakibatkan pasca pilkada yaitu terjadinya pemaksaan dilingkungan keluarga untuk memilih calon yang telah ditentukan kepala keluarga selain itu karena adanya perbedaan pilihan mengakibatkan konflik yang berujung pada kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan serta hilangnya rasa kebersamaan dalam masyarakat sekitar sehingga tidak lagi saling menyapa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Amran, H. Rekson S. Limba, 2017) yang berjudul “Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Hubungan Kekerabatan (Studi di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui terkait dampak dari pemilihan kepala daerah terhadap hubungan kekerabatan di Kecamatan Kabanea Timur serta apakah konflik-konflik yang selama ini terjadi di dalam masyarakat sebelum dan pasca pilkada disebabkan oleh adanya pemilihan kepala daerah. Adapun hasil penelitian ini yaitu terdapat beberapa dampak yang timbul dalam masyarakat dari pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kabanea Timur yaitu pertama dampak positif dimana dengan dilaksanakannya pilkada dapat menambah solidaritas internal dalam masyarakat ataupun kelompok masyarakat, selain itu masyarakat menjadi aktif serta produktif dalam hal melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pilkada. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu ada pemaksaan dari anggota keluarga dalam menentukan calon kandidat yang akan dipilih yang kemudian menimbulkan konflik dalam keluarga, hal ini juga berdampak dalam hubungan sosial yang mengalami kerenggangan akibat berbeda pilihan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bahtiar, 2017) yang berjudul “Pemilihan Kepala Daerah dan Disharmonisasi Keluarga (Studi Kasus pada Pilkada Kabupaten Muna Barat Tahun 2017)” membahas terkait disharmonisasi keluarga yang terjadi pasca pilkada tahun 2017 dalam masyarakat Kabupaten Muna Barat. Penelitian ini menemukan bahwa pasca

dilaksanakannya pilkada muncul beberapa konflik dalam dalam masyarakat dimana terjadinya disharmonisasi keluarga yang menyebabkan tidak adanya kerjasama dan komunikasi lagi antar keluarga akibat perbedaan pilihan dalam pilkada. Hal ini disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya wawasan dan pengetahuan dalam keluarga terkait pilkada, kurangnya iman dalam landasan rumah tangga, serta adanya masalah keuangan keluarga.

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya bisa dikatakan bahwa penelitian yang mengkaji tentang dampak sosial pilkada tidaklah banyak. Dari beberapa penelitian yang membahas terkait konflik dan dampak pilkada, rata-rata hanya fokus membahas tentang konfliknya saja seperti kerusuhan serta konflik kekerasan dan hanya sedikit sekali yang menjelaskan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk menyempurnakan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, dalam penelitian ini akan mengkaji tentang dampak sosial pasca pemilihan kepala daerah khususnya di daerah Kabupaten Pinrang.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk wilayah administratif daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih kepala daerah di wilayahnya seperti Gubernur untuk daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota. Pemilihan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan

Umum di Daerah baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ada di setiap daerah dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Segala hal yang menyangkut pilkada tertulis dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh masyarakat dengan memilih secara langsung calon pasangan kepala daerah yang telah terdaftar di KPU, masyarakat dapat memilih pasangan kepala daerahnya sesuai dengan pilihan masing-masing secara bebas, jujur dan adil. Mayoritas suara terbanyak yang diraih oleh pasangan kepala daerah menjadi acuan pemenang dalam pilkada.

Pada dasarnya pemilihan umum adalah tumpuan bangsa sebagai sarana demokrasi untuk menciptakan kehidupan pemerintahan (Prof. Dr. Miftah Thoha, 2017). Pelaksanaan sebuah pemilihan umum ternyata tidak mudah dan memerlukan biaya yang tidak murah serta melalui proses yang panjang. Tetapi beberapa negara di dunia termasuk Indonesia tetap menggunakan pemilihan umum sebagai jalan keluar atau solusi dari berbagai persoalan yang timbul meskipun harus mengeluarkan biaya yang sangat besar agar kehidupan demokrasi dapat tumbuh sesuai harapan konstitusi. Menurut (Chaniago, 2016) pemilu merupakan kenduri demokrasi

yang dijadikan landasan bangsa dan negara dalam berpolitik untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pemilu merupakan salah satu pilar penting demokrasi untuk mengantarkan negara serta bangsa dalam mendapatkan demokrasi dan membangun kemajuan negerinya. Pemilu juga merupakan momentum untuk evaluatif penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan cita- cita negara kemerdekaan.

Dengan adanya pilkada secara langsung diharapkan masyarakat memiliki pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka yaitu pemimpin yang bisa membawa wilayah Indonesia menjadi yang makmur, aman, dan maju (Zabidi, 2021) . Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pilkada peran masyarakat sangatlah penting, karena suara dari masyarakatlah yang akan menentukan siapa calon pasangan kepala daerah yang terpilih dan akan dilantik.

1.5.2 Konflik Sosial dan Faktor Penyebab Konflik

Konflik merupakan persepsi terkait adanya perbedaan kepentingan ataupun perbedaan kepercayaan dimana aspirasi seperti keinginan atau cita-cita dari pihak yang berkonflik tak bisa dicapai secara serentak. Konflik hadir akibat satu dari dua alasan yakni masing-masing pihak merasa percaya bahwa mereka bisa atau berhak mendapatkan suatu objek yang bernilai (Dean G. Pruitt, 2004). Adapun konflik secara sosiologis bisa diartikan sebagai proses sosialisasi antara dua individu atau lebih atau antara kelompok, dimana dalam hal ini salah satu pihak mencoba untuk menghilangkan atau menyingkirkan pihak lain dengan beberapa cara

(Herdin Arie Saputra, 2017). Berikut merupakan macam-macam bentuk konflik sosial menurut (Soerjano Soekanto, 2006) :

1. Konflik pribadi yaitu konflik yang terjadi antara individu yang disebabkan oleh masalah pribadi dari pihak yang berkonflik ataupun perbedaan pandangan dari masing-masing pihak dalam menyikapi suatu hal.
2. Konflik Politik yaitu konflik yang terjadi akibat adanya tujuan atau kepentingan politis yang berbeda, baik itu antar individu ataupun kelompok.
3. Konflik rasial adalah konflik yang terjadi antara kelompok etnis ataupun ras yang berbeda yang diakibatkan adanya perbedaan kepentingan serta kebudayaan yang saling bertabrakan.
4. Konflik antar kelas sosial merupakan konflik yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing kelas yang ada di masyarakat.
5. Konflik internasional adalah konflik yang melibatkan antar negara ataupun kelompok negara yang disebabkan oleh adanya perbedaan maksud dan kepentingan masing-masing.

Konflik juga bisa diartikan sebagai sebuah cara atau perjuangan antar individu maupun kelompok dalam memenangkan atau mencapai tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Menurut (Dean G. Pruitt, 2004) konflik yang berlangsung lama merupakan suatu akibat dari perilaku yang berkelanjutan serta tanggapan negatif terhadap pihak lawan. Adanya

keyakinan negatif akan secara tidak langsung membenarkan perasaan negatif sehingga membuat keyakinan negatif tersebut terasa benar. Adanya perilaku negatif serta kecurigaan yang timbul pada kedua pihak disebabkan oleh pertikaian yang akan mendorong tindakan-tindakan yang menghadirkan isu-isu lain serta penggunaan rencana yang lebih berat lagi agar mendapatkan kemenangan dari isu-isu tersebut.

Adapun sumber-sumber konflik menurut (Dean G. Pruitt, 2004) yaitu adanya prestasi dari masa lalu, perbandingan dengan orang lain, persepsi mengenai kekuasaan, aturan dan norma serta pembentukan kelompok pejuang. Di Indonesia, konflik bersumber dari banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dengan masyarakat yang sangat beragam mulai dari segi budaya, ras, etnis, agama, dan juga latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda. Banyaknya perbedaan tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan dengan adanya konflik sosial. (Soerjano Soekanto, 2006) menyimpulkan bahwa ada empat faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat khususnya di Indonesia. Pertama, perbedaan antar individu seperti perbedaan pendapat atau perasaan yang tentu dapat menimbulkan konflik. Kedua, perbedaan kepentingan seperti kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Ketiga, adanya perbedaan kebudayaan. Keempat, perbedaan yang diakibatkan oleh perubahan sosial yang cepat yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat.

Dalam masyarakat, saat dua kelompok atau lebih terlibat dalam suatu konflik maka akan sulit bagi masyarakat lainnya untuk berpihak atau netral. Salah satunya penyebabnya karena para anggota kelompok yang berkontroversi sering mencari dukungan dari pihak luar untuk bergabung bersama mereka dan jika tidak berarti akan menjadi lawan. Konflik biasanya selalu mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena hasil dari lingkaran konflik itu sendiri. Adanya kecenderungan dari masing-masing pihak yang semakin larut didalam konflik yang terjadi hingga bersedia mengeluarkan sumber daya sebanyak apapun demi memenangkan pertarungan (Dean G. Pruitt, 2004). Begitupun konflik yang terjadi dalam dunia politik, tidak terkecuali dalam pemilihan kepala daerah. Para pendukung masing-masing kandidat tidak segan mengeluarkan dana untuk mendapatkan massa demi memenangkan calon pilihannya.

Pada suatu proses demokrasi seperti pemilihan kepala daerah, konflik merupakan suatu keniscayaan karena setiap manusia atau kelompok sosial masing-masing memiliki tujuan yang berbeda (Surbakti, 1992). Potensi konflik sosial membayangi setiap penyelenggaraan pesta demokrasi politik tersebut. Dalam tatanan birokrasi, konflik yang terjadi secara tidak langsung akan berdampak kepada masyarakat dimana pelayanan akan menjadi tidak merata selain itu konflik yang terjadi dalam tatanan birokrasi dengan mudah akan mempengaruhi masyarakat hingga menciptakan konflik-konflik baru didalamnya. Jika terus menerus terjadi konflik dalam masyarakat maka akan menghambat kemajuan politik, ekonomi serta sosial budaya yang ada (Ida

Farida, Nanang Permana, Sopwan Ismail, 2020). Berikut yaitu faktor-faktor penyebab konflik menurut (Fisher, 2001) :

1. Teori hubungan masyarakat, teori ini menganggap konflik terjadi oleh polarisasi yang terus menerus terjadi, tidak adanya kepercayaan hingga terjadinya permusuhan diantara individu atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
2. Teori negosiasi prinsip, dalam teori ini menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh keadaan yang tidak selaras serta perbedaan pandangan terkait konflik oleh pihak yang mengalami konflik.
3. Teori kebutuhan manusia, dalam teori ini dijelaskan bahwa konflik disebabkan karena adanya kebutuhan sebagai manusia yang meliputi mental, fisik serta sosial yang tidak tercapai.
4. Teori identitas, teori ini menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh terancamnya identitas seseorang, yang sering dimulai dari hilangnya suatu hal dimiliki ataupun penderitaan dimasa lampau yang tidak kunjung terselesaikan
5. Teori kesalahpahaman budaya, dalam hal ini terjadinya konflik yang disebabkan oleh adanya ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara budaya-budaya yang berbeda.
6. Teori transformasi sosial, konflik dalam hal ini disebabkan oleh adanya ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang muncul dalam masalah ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Adapun beberapa cara dalam menghadapi konflik menurut (Jeong, 2008) yaitu :

1. Menghindari konflik, dalam hal ini tipe menghindar berorientasi pada kelambanan atau ketidaktahuan tentang masalah yang tidak nyaman dengan menjadi tidak berkomitmen. Menghindar atau menunda konflik menghasilkan lebih sedikit interaksi langsung dengan musuh. Tingkat interaksi yang rendah dihasilkan dari penurunan komitmen terhadap konflik. Mereka yang merasa gugup tentang suatu konflik mungkin ingin percaya bahwa konflik itu akan hilang jika mereka berpura-pura tidak ada masalah
2. Bersaing atau melawan, dalam bersaing pelaku berfokus untuk mencetak kemenangan, mengalahkan pihak lain dengan mencoba membuktikan betapa salahnya mereka. Perjuangan untuk mendapatkan keuntungan dalam hubungan diarahkan untuk melemahkan posisi protagonis, karena kerentanan pihak lain akan berarti kekuatannya sendiri yang lebih besar.
3. Mengalah, dalam mengalah satu pihak menawarkan konsesi sepihak dengan mengambil perspektif atau berpendapat kepentingan pihak lain lebih serius daripada milik sendiri; ini merupakan cara tercepat untuk menyelesaikan konflik. Mengalah dapat terjadi karena beberapa faktor intim seperti ikatan antarpribadi yaitu persahabatan dan cinta hingga hubungan kekerabatan. Identitas kelompok yang sama menimbulkan kepedulian terhadap kesejahteraan lawan. Konsesi sepihak dapat

dilakukan dengan harapan timbal balik atau sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan konsesi yang lebih besar dari pihak lain di masa depan.

4. Akomodasi, tipe mengakomodasi lebih terlihat ketika semua pihak mencari kepentingan bersama dalam menemukan pilihan yang memuaskan tujuan bersama (Hocker dan Wilmot, 1978). Strategi ini dapat dilakukan ketika semua orang menyadari bahwa bekerja sama akan saling menguntungkan. Kesepakatan dapat dicapai melalui negosiasi dengan mengubah strategi untuk memaksimalkan manfaat masing-masing. Para pihak dapat bekerja sama untuk menetapkan fakta yang dapat disepakati dengan mengeksplorasi metode penilaian yang adil atas klaim masing-masing. Yang terpenting, gerakan akomodatif juga lebih disukai karena menghindari konfrontasi kekerasan.

1.5.3 Dampak Sosial Pilkada

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dengan masyarakat yang sangat beragam mulai dari segi budaya, ras, etnis, agama, dan juga latar belakang pendidikan serta ekonomi yang berbeda. Banyaknya perbedaan itu menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan dengan adanya konflik sosial. Dari adanya konflik tersebut tentu juga akan menimbulkan dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat

Menurut (Michael Richards, 2012) dampak sosial adalah keseluruhan pengaruh sosial budaya pada kelompok masyarakat tertentu yang diakibatkan dari tindakan publik atau individu yang mengubah cara masyarakat tersebut untuk hidup, bekerja, bermain, dan berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. (Michael Richards, 2012) juga mengatakan bahwa masyarakat adalah bagian dari pembangunan dan untuk dapat memprediksi keberhasilan atau kegagalan pembangunan terletak pada melihat kemungkinan positif dan Dampak negatif dari pembangunan itu sendiri terhadap masyarakat.

Dampak sosial merupakan bentuk akibat dan pengaruh pada masyarakat yang terjadi karena adanya suatu hal seperti kejadian ataupun kebijakan (Kurniawan, 2015). Dampak sosial memberikan perubahan-perubahan dalam masyarakat, dampak dari adanya konflik dimana masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik atau kurang baik, hal ini tergantung dari hal yang terjadi sebelumnya. Adapun dampak dari konflik sosial menurut (Soerjano Soekanto, 2006) yaitu :

1. Menambah solidaritas dalam grup
2. Retaknya persatuan dalam kelompok akibat pertentangan
3. Perubahan kepribadian pada individu
4. Hancurnya materi seperti harta benda serta menimbulkan jatuhnya korban
5. Terjadi dominasi akibatnya takluknya salah satu pihak

Seperti halnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yang biasanya selalu menyisakan dampak sosial pada masyarakat. Dampak tersebut terjadi akibat timbulnya konflik-konflik yang terjadi dalam proses pelaksanaan pilkada. Dampak yang ditimbulkan bisa terjadi sebelum bahkan setelah dilakukannya pemilihan, dampak yang terjadipun berbeda-beda pada setiap masyarakat baik itu dampak ekonomi maupun dampak sosial (Yusnedi, 2018).

Hal ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan pilihan calon kepala daerah yang didukung antar masyarakat. Perbedaan dalam memilih kepala daerah tentu hal yang lumrah terjadi dalam pelaksanaan pilkada, terutama di era demokrasi seperti saat ini, masyarakat bebas menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya (Asrul Lapandewa, Rina Pusparani, 2020). Namun, masalah akan hadir jika dalam perbedaan tersebut timbul konflik yang berdampak negatif terhadap masyarakat. Ironis memang jika masyarakat terpecah karena perbedaan pilihan, tapi faktanya timbulnya konflik sosial selalu membayangi setiap penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, banyak kasus serupa yang terjadi selama pelaksanaan pilkada selama ini, hal ini terbukti dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang membahas terkait konflik dan dampak pilkada di beberapa daerah di Indonesia.

1.6 Defisini Konseptual dan Operasional

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan dengan menggunakan konsep-konsep lain, dalam hal ini untuk mempermudah peneliti dalam menjalankan konsep tersebut dalam penelitian (Ulber Silalahi, 2009). Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini, yaitu:

a. Konflik Sosial

Konflik Sosial merupakan persepsi terkait perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan dimana aspirasi seperti keinginan atau cita-cita dari pihak yang berkonflik tak bisa dicapai secara serentak (Dean G. Pruitt, 2004). Konflik sosial dimulai dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan pendapat dan pihak lainnya sehingga mendorong terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan tindakan atas dasar ketidaksetujuannya. (Soerjano Soekanto, 2006) menyimpulkan bahwa ada empat faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat khususnya di Indonesia. Pertama, perbedaan antar individu seperti perbedaan pendapat atau perasaan yang tentu dapat menimbulkan konflik. Kedua, perbedaan kepentingan seperti kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Ketiga, adanya perbedaan kebudayaan. Keempat, perbedaan yang diakibatkan oleh perubahan sosial yang cepat yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat.

b. Konflik Pilkada

Menurut (Michael Richards, 2012) dampak sosial adalah keseluruhan pengaruh sosial budaya pada kelompok masyarakat tertentu yang diakibatkan dari tindakan publik atau individu yang mengubah cara masyarakat tersebut untuk hidup, bekerja, bermain, dan berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Adapun dampak dari konflik sosial menurut (Soerjano Soekanto, 2006) yaitu menambah solidaritas dalam grup, retaknya persatuan dalam kelompok akibat pertentangan, perubahan kepribadian pada individu, hancurnya materi seperti harta benda serta menimbulkan jatuhnya korban, serta terjadi dominasi akibatnya takluknya salah satu pihak

1.6.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan terkait petunjuk secara rinci tentang apa yang akan diamati serta bagaimana peneliti akan mengamatinya, ini dilakukan agar dapat menjadi ukuran dalam penelitian (Ulber Silalahi, 2009). Berikut merupakan tabel definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1. 2 Defisini Operasional

Variabel	Penyebab	Dampak
Etnis	1. Keberagaman etnis. 2. Dominasi etnis tertentu. (etnis mayoritas dan minioritas) 3. Perbedaan kepentingan etnis.	1. Diskriminasi etnis. 2. Kecemburuan antar etnis. 3. Konflik sosial antar etnis.

Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan pandangan politik setiap masyarakat 2. Cara menanggapi perbedaan pilihan yang kurang baik 3. Sikap kepala daerah terpilih yang terkadang lebih mendahulukan pendukungnya dari pada masyarakat yang tidak mendukungnya dulu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menjadi terpartisi 2. Disharmonisasi kehidupan masyarakat 3. Program kegiatan pemerintahan desa menjadi tidak maksimal.
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pilkada yang sangat mahal. 2. Dukungan bersifat transaksional. 3. Keterbatasan ekonomi dan pendidikan politik masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan masyarakat, baik secara individual atau kelompok dalam membiayai pilkada, baik itu dengan sukarela ataupun terpaksa. 2. Memicu terjadinya manajemen pemerintahan yang korupsi. 3. Terjadi praktik jual beli suara.
Hubungan Interaksi Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perbedaan pilihan calon kepala daerah 2. Kurangnya pendidikan berpilkada sebagian masyarakat 3. Peran KPU dan Bawaslu yang masih kurang 4. Netralitas ASN yang masih lemah ketika pilkada berlangsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan organisasi, rekan kerja, dan keluarga menjadi kurang harmonis dan tidak saling menyapa 2. Program organisasi atau komunitas tidak lagi berjalan 3. Diskriminasi dari pendukung pihak yang menang kepada pendukung pihak yang kalah 4. Memicu munculnya konflik horisontal jangka panjang dalam masyarakat

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Creswell, 2013) merupakan penelitian yang mengkaji atau menyelidiki maksud dari sejumlah kelompok atau individu yang muncul dari masalah sosial dilingkungannya. Penelitian kualitatif biasanya bisa digunakan untuk meneliti terkait kehidupan sosial,

fenomena, tingkah laku, atau masalah-masalah lain yang terjadi pada masyarakat. Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha memahami atau menafsirkan makna dalam suatu peristiwa maupun interaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Adapun pengertian dari studi kasus menurut (Creswell, 2013) merupakan sebuah penelitian yang mengkaji atau menyelidiki suatu hal yang bersangkutan dengan kasus yang hadir dalam kurun waktu tertentu dengan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam oleh berbagai sumber informasi terpercaya. Pengumpulan data dapat diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi langsung serta dengan mengumpulkan laporan atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Adapun kasus dalam hal ini yaitu berupa aktivitas, peristiwa, proses atau program (Creswell, 2013).

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang bagaimana dampak sosial pasca pilkada dalam masyarakat Kabupaten Pinrang serta apa saja langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi dampak tersebut.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah yang tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi pada saat pilkada di Sulsel, dimana 80% - 85% dari jumlah daftar pemilih tetap ikut serta dalam pilkada (Mansyur, 2018), jumlah ini terus bertambah dari setiap periode dalam tiga kali pilkada

di Kabupaten Pinrang. peneliti melihat bahwa setiap menjelang dan pasca pilkada di Kabupaten Pinrang, nampak jelas terjadi polarisasi antara warga dan kelompok masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya persaingan yang terjadi dalam masyarakat dalam memenangkan calon pilihannya, oleh karena itu peneliti memilih Kabupaten Pinrang untuk menjadi lokasi penelitian.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan kumpulan informasi ataupun catatan yang telah terbukti dan sesuai fakta. Dalam penelitian terdapat dua jenis data yaitu data primer serta data sekunder.

- a. Data primer merupakan data utama yang di diperoleh secara langsung dari objek atau responden yang akan diteliti (Bungin, 2017), dipenelitian ini peneliti akan menggunakan data primer berupa wawancara dari beberapa sumber yang terkait langsung dari permasalahan yang diteliti.
- b. Data sekunder merupakan data kedua setelah data primer yang bersumber dari tulisan ataupun catatan dan juga dokumentasi seperti buku literatur, jurnal, dan web (Bungin, 2017).

Dalam penelitian akan didominasi oleh data primer yang didapatkan langsung dari responden yang telah dipilih. Adapun data sekunder akan digunakan sebagai pendukung dari data primer yang telah didapatkan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data atau informasi terkait dampak sosial pasca pilkada, peneliti akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data seperti:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara sistematis dalam memperoleh data atau informasi-informasi dalam bentuk pernyataan lisan terkait gambaran dari pengalaman atau apa yang dialami dari responden. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau responden (Bungin, 2013). Wawancara dipenelitian ini dilakukan agar mengetahui secara langsung dari responden terpercaya tentang faktor apa saja yang mempengaruhi adanya konflik sosial pasca pilkada serta dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut terhadap masyarakat di Kabupaten pinrang.

Adapun responden atau informan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu :

1. Andi Aslam Patonangi (Bupati Kabupaten Pinrang 2009-2019)
2. Andi Irwan Hamid (Bupati Kabupaten Pinrang 2019-2024)
3. Muhammad Darwis Bastama (Wakil Bupati Kabupaten Pinrang 2014-2019)

4. Rusli Kamalo (Tokoh masyarakat/Politikus)
 5. Muhammad Abu (Kepala Desa Rajang)
 6. Hikmi (Tokoh masyarakat dan pegiat komunitas)
- b. Teknik Dokumenter

Selain teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumenter. Teknik dokumenter menurut (Bungin, 2013) merupakan teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial dengan melalui data lampau. Dokumenter biasanya digunakan peneliti sesuai dengan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan hal yang diteliti baik itu topik penelitian, jurnal dan artikel penelitian (Bungin, 2013). Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pilkada yang terjadi di Kabupaten Pinrang seperti data dari beberapa lembaga, foto, dan yang lain. Dokumen-dokumen tersebut diharapkan menjadi data pendukung dari data-data yang didapatkan dari data primer.

1.7.5 Metode Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari data dengan menyusun dengan sistematis data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data serta memilah mana yang penting untuk dipelajari dan menyusun pola dari data yang didapatkan (Matthew B. Miles, 1992), dipenelitian ini, penulis atau peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi serta catatan-catatan lapangan. Dalam teknik analisis data kualitatif membahas atau menganalisis mengenai konsep

permasalahan tanpa disertai angka ataupun hitungan. Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tahapan yang diterapkan oleh (Matthew B. Miles, 1992) yaitu analisis yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau biasa disebut verifikasi data. Berikut penjelasan tentang langkah-langkah analisis data menurut (Matthew B. Miles, 1992) :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan menentukan dan memilah data yang telah didapatkan sebelumnya, data-data yang dianggap tidak terlalu penting akan disingkirkan terlebih dahulu sehingga dalam proses ini akan menghasilkan data-data pokok atau informasi bermakna yang akan mempermudah dalam penarikan kesimpulan nanti.

b. Penyajian Data

Dalam kegiatan penyajian data, informasi-informasi yang telah dipilih sebelumnya akan dikelompokkan dan disusun secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari kegiatan analisis data dimana dalam kegiatan ini data yang telah disusun akan kembali diuji agar memperoleh suatu data yang sungguh-sungguh valid, data yang ada akan dibandingkan dan dihubungkan satu sama lain sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan.

1.7.6 Bagan Alir Penelitian

